

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengangguran

2.1.1.1 Pengertian Pengangguran

Pengangguran (unemployment) didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja (labor force) tidak memiliki pekerjaan dan secara aktif sedang mencari pekerjaan (Nanga, 2001: 253).

Orang yang menganggur dapat didefinisikan orang yang tidak bekerja dan secara aktif mencari pekerjaan selama empat minggu sebelumnya, sedang menunggu pamggilan kembali untuk suatu pekerjaan setelah diberhentikan atau sedang menunggu melapor atas pekerjaan yang baru dalam waktu empat minggu (Sandy Dharmakusuma, 1998: 45).

Menurut Afrida (2003: 134), pada dasarnya orang mengatakan bahwa penyebab dari pengangguran adalah ketidakseimbangannya antara penawaran tenaga kerja dengan permintaan tenaga kerja. Sebagian tenaga kerja yang menawarkan tenaganya mencari pekerjaan dan berhasil mendapatkannya (employ) sisanya yang gagal atau belum mendapatkan pekerjaan dapat dikategorikan sebagai penganggur, asal ia masih pekerjaan. Istilah penganggur merupakan terjemahan dari *unemployed*, namun agar dapat diartikan penganggur, terhadap syarat yang harus dipenuhi. Syarat itu adalah ia harus aktif mencari pekerjaan sehingga lebih banyak dikategorikan sebagai pencari kerja. Setiawan (2013: 2) mengatakan bahwa pengangguran dapat terjadi sebagai akibat dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Atau dengan kata lain, di dalam pasar tenaga kerja jumlah penawaran akan tenaga kerja yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan jumlah permintaan tenaga kerja.

Sedangkan dalam ilmu kependudukan (demografi), orang yang mencari kerja masuk dalam penduduk yang disebut angkatan kerja. Berdasarkan kategori usia, usia angkatan kerja adalah 15-64 tahun. Tetapi tidak semua penduduk yang berusia 15-64 tahun dihitung sebagai angkatan kerja. Yang dihitung sebagai angkatan kerja adalah penduduk berusia 15-64 tahun yang bekerja dan sedang mencari kerja. Tingkat pengangguran merupakan persentase angkatan kerja yang tidak atau belum mendapatkan pekerjaan (Rahardja, 2008: 376).

Ada dua dasar utama klasifikasi pengangguran, yaitu pendekatan angkatan kerja (labour force approach) dan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (labour utilization approach) (Rahardja, 2008: 378):

1. Pendekatan angkatan kerja (labour force approach)
Pendekatan ini mendefinisikan penganggur sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja.
2. Pendekatan pemanfaatan tenaga kerja (labour utilization approach)
Dalam pendekatan ini, angkatan kerja dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:
 - a. Menganggur (Unemployed) yaitu mereka yang sama sekali tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Kelompok ini sering disebut juga sebagai pengangguran terbuka (*Open Employment*).
 - b. Setengah menganggur (*Underemployed*) yaitu mereka yang bekerja, tetapi belum dimanfaatkan secara penuh, artinya jam kerja mereka dalam seminggu kurang dari 35 jam.
 - c. Bekerja penuh (*Employed*) yaitu mereka yang bekerja penuh atau jam kerjanya mencapai 35 jam perminggu.

2.1.1.2 Jenis-Jenis Pengangguran

Terdapat beberapa jenis-jenis pengangguran. Menurut Sukirno (2004: 328) terdapat dua cara untuk menggolongkan jenis-jenis pengangguran yaitu berdasarkan sumber/penyebab yang mewujudkan pengangguran dan ciri pengangguran tersebut. Berikut jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya.

1. Pengangguran Normal atau Friksional adalah jenis pengangguran yang disebabkan penganggur ingin mencari pekerjaan yang lebih baik.
2. Pengangguran Siklikal adalah jenis pengangguran yang disebabkan merosotnya kegiatan ekonomi atau karena terlampau kecilnya permintaan agregat di dalam perekonomian dibanding penawaran agregatnya.
3. Pengangguran Struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan adanya perubahan struktur kegiatan ekonomi.
4. Pengangguran Teknologi adalah pengangguran yang disebabkan adanya penggantian SDM dengan teknologi/mesin dalam proses produksi.

Lebih lanjut menurut (Sukirno, 2004: 330), penggolongan jenis pengangguran berdasarkan cirinya adalah sebagai berikut:

1. Pengangguran terbuka adalah pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja.
2. Pengangguran tersembunyi adalah pengangguran ini tercipta sebagai akibat jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi lebih banyak dari

yang sebenarnya yang diperlukan.

3. Pengangguran bermusim adalah pengangguran yang tercipta akibat musim yang ada, biasanya pengangguran ini terdapat di sektor pertanian dan perikanan
4. Setengah menganggur adalah pengangguran yang tercipta akibat tenaga kerja bekerja tidak sepenuh dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal.

2.1.1.3 Dampak Pengangguran

1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian
 - a. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan kesejahteraan yang mungkin dicapainya. Pengangguran menyebabkan pendapatan nasional yang sebenarnya (*actual output*) dicapai lebih rendah dari pada pendapatan nasional potensial (*potential output*). Keadaan ini berarti tingkat kemakmuran masyarakat yang dicapai lebih rendah dari pada tingkat yang mungkin dicapainya.
 - b. Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak (*tax revenue*) pemerintah berkurang. Pengangguran yang diakibatkan oleh tingkat kegiatan ekonomi yang rendah, pada gilirannya akan menyebabkan pendapatan yang diperoleh pemerintah akan semakin sedikit. Dengan demikian, pengangguran yang tinggi akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan berbagai kegiatan pembangunan.
 - c. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi, pengangguran menimbulkan dua akibat buruk pada sektor swasta. Pertama, pengangguran tenaga kerja biasanya akan diikuti pula dengan kelebihan kapasitas mesin-mesin perusahaan. Keadaan ini jelas tidak akan mendorong perusahaan untuk melakukan investasi di masa yang akan datang. Kedua, pengangguran yang diakibatkan kelesuan kegiatan kegiatan perusahaan menyebabkan keuntungan berkurang. Keuntungan yang rendah mengurangi keinginan perusahaan untuk melakukan investasi. Kedua hal tersebut jelas tidak akan menggalakkan pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.
2. Dampak pengangguran terhadap individu dan masyarakat
 - a. Pengangguran akan menyebabkan kehilangan mata pencaharian dan pendapatan. Di negaranegara maju, para penganggur memperoleh tunjangan (bantuan keuangan) dari badan asuransi pengangguran, dan oleh sebab itu, mereka masih mempunyai pendapatan untuk membiayai kehidupan dan keluarganya. Di negara sedang berkembang tidak terdapat program asuransi pembangunan, dan karenanya kehidupan penganggur

harus dibiayai oleh tabungan masa lalu atau pinjaman (bantuan keluarga dan temanteman). Keadaan ini potensial bisa mengakibatkan pertengkaran dan kehidupan keluarga yang tidak harmonis.

- b. Pengangguran dapat menyebabkan kehilangan keterampilan. Keterampilan dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan hanya dapat dipertahankan apabila keterampilan tersebut digunakan dalam praktek. Pengangguran dalam kurun waktu yang lama akan menyebabkan tingkat keterampilan pekerjaan menjadi semakin merosot.
- c. Selain hal-hal tersebut pengangguran dapat pula menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kegiatan ekonom yang lesu dan pengangguran yang tinggi dapat menimbulkan rasa tidak puas masyarakat kepada pemerintah yang berkuasa. Kegiatankegiatan kriminal seperti pencurian dan perampokan dan lain sebagainya pun akan semakin meningkat.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (2012: 29) pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan ekonomi yang berlaku dari waktu ke waktu dan menyebabkan pendapatan nasional riil semakin berkembang. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan persentasi kenaikan pendapatan nasional riil pada suatu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan pendapatan nasional riil pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK).

Rumus Pertumbuhan Ekonomi:

$$G = \frac{PDRB_1 - PDRB_0}{PDRB_0} \times 100\%$$

Keterangan:

- | | |
|---------|----------------------------|
| G: | Pertumbuhan Ekonomi |
| PDRB 1: | PDRB ADHK tahun ini |
| PDRB 0: | PDRB ADHK tahun sebelumnya |

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Michael todaro (2006: 125) mengklasifikasi teori-teori pertumbuhan

ekonomi dalam empat pendekatan, antara lain teori pertumbuhan linier (linier stages of growth), teori pertumbuhan struktural, teori revolusi ketergantungan internasional (depedensia), dan teori neo-Klasik.

1) Teori Pertumbuhan Ekonomi Linier

a. Teori Pertumbuhan dari Adam Smith

Adam Smith membagi tahapan pertumbuhan ekonomi menjadi lima tahap yang berurutan, yaitu dimulai dari masa perburuan, masa berternak, masa bercocok tanam, masa perdagangan, dan yang akhir masa perindustrian. Dari tahapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanah memegang peranan yang penting dalam pertumbuhan. Dalam teori ini, Adam Smith memandang pekerja sebagai salah satu input dalam proses produksi. Pembagian kerja merupakan hal utama dalam upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Spesialisasi yang dilakukan oleh tiap-tiap pelaku ekonomi dipengaruhi oleh faktor-faktor pendorong, yaitu peningkatan keterampilan kerja dan penemuan mesin-mesin yang dapat menghemat tenaga. Menurut Adam Smith proses pertumbuhan akan

terjadi secara simultan dan memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Peningkatan kinerja pada suatu sektor akan meningkatkan daya tarik bagi pemupukan modal, mendorong kemajuan teknologi, meningkatkan spesialisasi dan memperluas pasar. Hal-hal tersebut nantinya akan mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi semakin pesat.

b. Teori Rostow

W.W Rostow menyatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi dapat dibedakan dalam lima tahapan, antara lain masyarakat tradisional, prasyarat lepas landas, tahap gerak menuju kemenangan, dan tahap konsumsi masa tinggi. Menurut Rostow, setiap negara berada dalam salah satu dari tahap-tahap tersebut. Tahap-tahap pertumbuhan ini sebenarnya berpangkal pada keadaan-keadaan dinamis dari permintaan, penawaran, dan pola produksinya.

Tahap-tahap pertumbuhan ini tidak dapat dipisahkan dari adanya kekuatan permintaan dikarenakan tahap-tahap yang pesat dalam sektor tertentu tidak hanya tercermin dari segi produksi saja, tetapi juga dari harga dan pendapatan yang tinggi. Sektor-sektor berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat teknologi dan kemauan para pengusaha untuk berinovasi, tetapi juga oleh kekuatan permintaan dalam hubungannya dengan harga.

2) Teori Pertumbuhan Struktural

a. Teori Pembangunan Arthur Lewis

Dualisme ekonomi teori pertumbuhan struktural ini pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah perkotaan dan daerah pedesaan.

Teori ini juga membahas pada investasi yang terjadi di sektor modern dan termasuk juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern. Teori ini pertama kali ditulis oleh Arthur Lewis dengan judul artikel “Pembangunan Ekonomi dengan Penawaran Tenaga Kerja yang Tidak Terbatas” pokok permasalahan yang dikaji Lewis adalah adanya asumsi bahwa dalam perekonomian suatu negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua struktur perekonomian yaitu perekonomian tradisional dan perekonomian modern.

Teori ini mengatakan bahwa adanya pengangguran tidak kentara di sektor pertanian mengakibatkan sektor industri dalam posisi untuk berkembang secara cepat, tergantung hanya pada akumulasi modal. Laju pertumbuhan tersebut akan lebih cepat dari pertumbuhan penduduk sehingga pada akhirnya semua pengangguran tidak kentara akan terserap ke sektor industri.

a. Teori Harrod-Domar

Teori Harrod-Domar merupakan perluasan dari analisis Keynes mengenai kegiatan ekonomi secara nasional dan masalah tenaga kerja. Analisis Keynes dianggap kurang lengkap karena tidak membicarakan masalah-masalah ekonomi jangka panjang. Harrod-Domar menganalisis syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian bisa tumbuh dan berkembang dalam jangka panjang (Steady Growth). Teori Harrod-Domar menyebutkan bahwa investasi merupakan kunci dalam pertumbuhan ekonomi. Investasi berpengaruh terhadap permintaan agregat melalui penciptaan pendapatan dan penawaran agregat melalui peningkatan kapasitas produksi. Analisis Harrod-Domar menggunakan asumsi-asumsi berikut: (i) barang modal mencapai kapasitas penuh, (ii) tabungan adalah proposional dengan pendapatan nasional, (iii) rasio modal produksi (capital output ratio) nilainya tetap, dan (iv) perekonomian terdiri dari dua sektor.

Dalam analisisnya, walaupun pada suatu tahun tertentu barang-barang modal sudah mencapai kapasitas penuh, maka kapasitas barang modal menjadi semakin tinggi pada tahun berikutnya. Misalnya pada tahun ke0 pengeluaran agregat yaitu $AE = C + I$. Sementara itu jumlah barang modal pada keseimbangan ini adalah K_0 . Adanya investasi menyebabkan jumlah barang modal pada tahun ke1 bertambah sehingga $K_1 = K_0$. Agar seluruh barang modal digunakan sepenuhnya, pengeluaran agregat pada tahun tersebut harus mencapai $AE_1 = C + I + \Delta I$. Dengan pengeluaran agregat ini kapasitas penuh akan tercapai kembali. Analisis tersebut menunjukkan bahwa dalam ekonomi dua sektor investasi harus terus mengalami kenaikan agar perekonomian tersebut

mengalami pertumbuhan yang berkepanjangan. Pertambahan investasi diperlukan untuk meningkatkan pengeluaran agregat.

3) Teori Depedensia

Teori depedensia berusaha menjelaskan penyebab keterbelakangan ekonomi yang dialami oleh negara-negara berkembang. Asumsi dasar teori ini adalah pembagian perekonomian dunia menjadi dua golongan, yang pertama adalah perekonomian negara-negara maju dan kedua adalah perekonomian negara-negara sedang berkembang.

Pada pendekatan ini, terdapat tiga aliran pemikiran yang utama, yaitu model ketergantungan neokononial menghubungkan keberadaan negara-negara terbelakang terhadap evolusi sejarah hubungan internasional yang tidak seimbang antara negara-negara kaya dengan negara miskin dalam sistem kapitalis internasional. Sementara itu, model paradigma palsu mencoba menghubungkan antara negara-negara maju dengan negara miskin melalui kebijakan-kebijakan yang sebenarnya akan mendoktrin para pemimpin dan pembuat kebijakan di negara berkembang.

Dengan demikian, tanpa disadari mereka akan menelan konsep asing dan model teoritis yang serba maju walaupun sebenarnya tidak cocok untuk diterapkan di wilayahnya sendiri. Lain halnya dengan tesis pembangunan-dualistik yang memandang dunia dalam dua kelompok besar, yaitu negara-negara kaya dan miskin. Pada negara miskin terdapat segelintir penduduk yang kaya di antara penduduk yang miskin.

4) Teori Neo-Klasik

Teori Neo-Klasik muncul untuk menjawab sanggahan dari teori depedensia yang cenderung menggunakan pendekatan yang bersifat revolusioner. Para ekonom yang penganut teori ini mengatakan bahwa semakin besar campur tangan pemerintah dalam perekonomian maka semakin lambat laju perekonomian yang didasarkan pada pasar bebas. Namun, teori ini hanya tepat diterapkan di negara-negara maju daripada negara sedang berkembang. Perbedaan struktur masyarakat dan kelembagaan yang dimiliki oleh negara maju dan negara sedang berkembang.

Menurut Neo-Klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung kepada perkembangan faktor-faktor produksi dalam persamaan, pandangan tersebut dapat dinyatakan dengan persamaan:

$$\Delta Y = f(\Delta K, \Delta L, \Delta T)$$

Keterangan :

ΔY adalah tingkat pertumbuhan ekonomi

ΔK adalah tingkat pertumbuhan modal

ΔL adalah tingkat pertumbuhan penduduk

ΔT adalah tingkat perkembangan teknologi

Sumbangan terpenting dari teori pertumbuhan Neo-Klasik dalam menunjukkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi tetapi dalam sumbangannya untuk menggunakan teori tersebut untuk mengadakan penyelidikan empiris dalam menentukan peranan sebenarnya dari berbagai faktor produksi dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut teori Neo-Klasik, rasio modal tenaga kerja yang rendah pada negara-negara berkembang menjanjikan tingkat pengembalian investasi yang lebih tinggi, meningkatkan produktivitas, dan meningkatkan standar kehidupan. Namun kenyataannya, banyak negara berkembang yang tidak tumbuh atau hanya tumbuh sedikit dan gagal menarik investasi asing. Perilaku tersebut memicu lahirnya konsep teori pertumbuhan endogen.

Pengembangan teori pertumbuhan endogen berawal dari adanya penolakan terhadap pendapat yang menyatakan bahwa teknologi yang memberi sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi bersifat eksogen. Dalam teori ini, teknologi dapat dipengaruhi sehingga akan bersifat endogen. Teori ini menggunakan beberapa asumsi sebagai berikut: (1) adanya eksternalitas dalam perekonomian, dan (2) imperfect market dalam produksi intermediate input.

Menurut teori pertumbuhan endogen, sumber-sumber pertumbuhan disebabkan adanya peningkatan akumulasi modal dalam arti yang luas. Modal dalam teori ini tidak hanya modal fisik tetapi juga yang bersifat non fisik berupa ilmu pengetahuan dan teknologi. Adanya penerimaan baru berawal dari proses learning by doing. Proses ini dapat memunculkan penemuan-penemuan baru yang meningkatkan efisiensi produksi sehingga akan meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, kualitas sumberdaya manusia merupakan faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.3 Ukuran Pertumbuhan Ekonomi

Tingkat pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh pertambahan yang sebenarnya atas barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi dalam suatu perekonomian. Dengan demikian untuk menemukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara perlu dihitung pendapatan nasional riil, yaitu Produk Domestik Bruto atau Produk Nasional Bruto.

a. Produk Domestik Bruto

Bagi negara-negara berkembang, konsep Produk Domestik Bruto (PDB) atau *Gross Domestic Bruto* (GDP) merupakan suatu konsep yang paling penting jika dibandingkan dengan konsep pendapatan nasional lainnya. Produk Domestik Bruto (PDB), dapat diartikan sebagai nilai barang dan jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu. Dalam suatu perekonomian, barang dan jasa yang diproduksi bukan hanya dihasilkan oleh perusahaan milik warga negara tersebut melainkan juga perusahaan milik warga negara lain. Pada umumnya, hasil produksi nasional juga berasal dari faktor-faktor produksi luar negeri. Output yang dihasilkan merupakan bagian yang cukup penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Oleh sebab itu, nilai produksi yang disumbangkan perlu dihitung dalam pendapatan nasional.

b. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat digunakan sebagai alat ukur pertumbuhan yang lebih baik dalam mencerminkan kesejahteraan penduduk. Hal ini disebabkan perhitungan PDRB yang lebih menyempit dari perhitungan PDB. PDRB hanya mengukur pertumbuhan perekonomian di lingkup wilayah, pada umumnya wilayah provinsi dan kabupaten.

2.1.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Samuelson (2004: 250) ada empat roda atau faktor yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1. Sumberdaya Manusia

Input tenaga kerja sendiri dari kuantitas tenaga kerja dan keterampilan angkatan kerja. Para ekonom meyakini bahwa kualitas tenaga kerja yang berupa keterampilan, pengetahuan, dan disiplin angkatan kerja merupakan unsur terpenting dalam pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya tenaga kerja yang terampil dan terlatih, barang-barang modal yang tersedia tidak akan dapat digunakan secara efektif.

Peningkatan tersedianya jumlah tenaga kerja bagi proses produksi itu dapat terlihat baik dari jumlah tenaga kerja dalam arti orang ataupun dalam jumlah hari kerja orang (mandays) maupun jam kerja orang (manhours). Dapat saja terjadi jumlah orang yang bekerja tetap tetapi jumlah hari kerja orang atau jam kerja orangnya bertambah. Untuk itu perlu diketahui bahwa tersedianya jam kerja dalam proses produksi itu dipengaruhi oleh kemauan dan kemampuan untuk bekerja.

Teori ekonomi telah menemukan bahwa kemasannya bahwa kemauan seseorang untuk bekerja lebih banyak dipengaruhi oleh tingkat upah yang

tersedia. Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat upah maka semakin tinggi kemauan seseorang untuk bekerja. Sementara itu, kemampuan bekerja seseorang dipengaruhi oleh kesehatan, kecakapan, keterampilan, dan keahliannya. Lebih jauh lagi, tingkat kecakapan, keterampilan, dan keahlian seseorang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan baik formal maupun non-formal seperti latihanlatihan kerja.

2. Sumberdaya Alam

Yang dapat dikategorikan sebagai sumber daya alam di antaranya tanah yang baik untuk ditanami, minyak dan gas, hutan, air, serta bahan-bahan mineral. Beberapa negara telah mengalami pertumbuhan terutama berdasarkan landasan sumberdaya yang sangat besar dengan output besar dalam bidang pertanian, perikanan, dan kehutanan. Namun, pemilikan sumberdaya alam bukan merupakan keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern. Adapula negara-negara maju yang meraih kemakmuran pada sektor industri. Hal ini dikarenakan adanya pemusatan perhatian pada sektor-sektor yang lebih bergantung pada tenaga kerja dan modal. pembentukan modal bersih.

3. Pembentukan Modal

Akumulasi modal selalu menghendaki pengorbanan konsumsi pada saat ini selama beberapa tahun. Negara-negara yang tumbuh pesat cenderung berinvestasi sangat besar dalam barang modal baru. Pada negara-negara dengan pertumbuhan paling pesat. Sepuluh hingga dua puluh persen output akan masuk dan pembentukan modal bersih

4. Perubahan Teknologi dan Inovasi

Kemajuan teknologi telah menjadi unsur vital keempat dari pertumbuhan standar hidup yang pesat. Dewasa ini, terjadi ledakan-ledakan teknologi baru, khususnya dalam informasi, komputasi, komunikasi, dan sains kehidupan. Perubahan teknologi menunjukkan perubahan proses produksi atau pengenalan produk dan jasa baru. Pentingnya peningkatan standar hidup membuat para ekonom sejak lama mempertimbangkan cara mendorong kemajuan teknologi. Semakin lama semakin jelas bahwa perubahan teknologi perubahan teknologi bukan hanya sekedar prosedur mekanis untuk menentukan produk dan proses yang lebih baik. Sebaliknya, inovasi yang cepat memerlukan pemupukan semangat kewirausahaan.

2.1.3 Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja

2.1.3.1 Pengertian Tenaga Kerja dan Angkatan Kerja (Irawan dan M. Soeparmoko, 2002: 114):

Tenaga kerja adalah penduduk pada usia kerja antara 15-64 tahun yang digolongkan menjadi dua usia kerja adalah angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja, sedangkan angkatan kerja itu adalah (labor force) penduduk yang bekerja dan belum bekerja, namun siap untuk bekerja atau sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah yang berlaku.

Menurut Poyaman J. Simanjuntak (1993: 2):

1. Tenaga kerja mencakup penduduk yang sudah dan sedang mencari pekerjaan dan melakukan kegiatan yang lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.
2. Angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan menganggur dan mencari pekerjaan seperti golongan yang bersekolah, mengurus rumah tangga, dan penerimaan pendapatan dan sebagainya.

Menurut Biro Pusat Statistik Jawa Timur (1998: 54)

1. Angkatan kerja adalah penduduk yang berusia 10 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan tertentu dan suatu kegiatan ekonomi dan mereka yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan tidak terhitung sebagai angkatan kerja, pensiunan, dan tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan.

2.1.3.2 Teori Ketenagakerjaan

Salah satu yang bisa muncul dalam bidang angkatan kerja adalah ketidakseimbangan antara permintaan akan tenaga kerja (demand for labor) dan penawaran tenaga kerja (supply for labor), pada suatu tingkat upah (Kusumosuwindho, 1981: 57), ketidakseimbangan tersebut berupa:

- a. Lebih besarnya penawaran dibandingkan permintaan tenaga kerja (adanya excess supply for labor).
- b. Lebih besarnya permintaan dibandingkan penawaran tenaga kerja (excess demand for labor)

Ada dua teori penting perlu dikemukakan dalam kaitannya dengan masalah ketenagakerjaan adalah:

1. Teori Lewis (Mulyadi, 2003: 56) yang mengemukakan bahwa kelebihan pekerja merupakan kesempatan dan bukan merupakan suatu masalah. Kelebihan pekerja suatu sektor akan memberikan andil terhadap pertumbuhan output di sektor lain.

Ada dua struktur dalam perekonomian di negara berkembang, yaitu sektor kapitalis modern dan subsisten terbelakang. Menurut Lewis sektor subsisten terbelakang tidak hanya terdiri dari sektor pertanian, tetapi juga sektor informal seperti pedagang-pedagang kaki lima dan pengecer koran.

Sektor subsisten terbelakang mempunyai kelebihan penawaran pekerja

dan tingkat upah yang realtif murah dari sektor kapitalis modern. Lebih murah nya biaya upah pekerja asal pedesaan akan dapat menjadi pendorong pengusaha di perkotaan untuk memanfaatkan pekerja tersebut dalam pengembangan industri modern di perkotaan. Selama berlangsungnya proses industrialisasi, kelebihan penawaran tenaga kerja di sektor subsisten terbelakang akan diserap.

Dengan demikian menurut Lewis adanya kelebihan penawaran pekerja tidak memberikan masalah pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya kelebihan pekerja justru merupakan modal utmuk mengakumulasikan pendapatan, dengan asumsi bahwa perpindahan pekerja dari sektor subsisten ke sektor kapitalis modern berjalan lancar dan perpindahan tersebut tidak akan pernah menjadi “terlalu banyak”.

2. Teori Fei-Ramis (Mulyadi, 2003: 57) yang berkaitan dengan negara berkembang yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: kelebihan buruh, sumber daya alam yang belum dapat diolah, sebagian besar penduduknya bergerak di sektor pertanian, banyaknya pengangguran, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi.

2.1.3.3 Konsep Ketenagakerjaan

Beberapa pengertian yang berhubungan dengan keteanagakerjaan adalah:

1. Tenaga Kerja (Man Power)
Adalah penduduk dalam usia kerja (15-64 tahun) jumlah penduduk dalam suatu daerah yang dapat memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga mereka atau mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas tersebut.
2. Angkatan Kerja (Labor Force)
Adalah bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu produksi barang dan jasa.
3. Tingkatan partisipasi angkatan kerja (labor force partcipation rate)
Adalah menggambarkan jumlah angkatan kerja dalam suatu kelompok atau umur sebagai prosentase penduduk dalam kelompok umur tersebut.
4. Tingkatan Pengangguran (unemployment rate)
Adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif mencari pekerjaan.

2.1.3.4 Angkatan Kerja dan Pasar Kerja

Besarnya penawaran atau supply tenaga kerja dalam masyarakat adalah jumlah orang yang menawarkan jasanya untuk proses produksi. Di antara mereka sebagian sudah aktif dalam kegiatannya yang menghasilkan barang atau jasa. Mereka dinamakan golongan yang bekerja atau *employeeed person*. Sebagian lain tergolong yang siap bekerja dan sebagian sedang berusaha mencari pekerjaan mereka dinamakan pencari kerja atau pengangguran. Jumlah yang bekerja dinamakan angkatan kerja atau *labor force*.

Jumlah orang yang bekerja tergantung besarnya permintaan atau demand dalam masyarakat. Permintaan tersebut dipengaruhi tingkat ekonomi dan tingkat upah. Proses terjadinya penempatan atau hubungan kerja melalui penyediaan dan permintaan tenaga kerja dimana pasar kerja. Seseorang dalam pasar kerja berarti dia menawarkan jasanya untuk diproduksi, apakah dia sedang bekerja atau mencari pekerjaan.

2.1.3.5 Kualitas Tenaga Kerja

Sejauh ini memperhatikan peranan tenaga kerja sebagai salah satu faktor produksi yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat pendapatan nasional baru dari segi kualitas dan jumlahnya saja sementara ini kita beranggapan bahwa kalau jumlah tenaga kerja yang dipakai dalam usaha produksi meningkat, maka jumlah produksi yang bersangkutan juga meningkat. Dengan kata lain kalau tidak ada peningkatan jumlah tenaga kerja, maka jumlah produksi akan tetap. Pernyataan yang demikian ini tidak dapat seluruhnya, dianggap berat karena walaupun jumlah titik itu tidak berubah tetapi kualitas dari tenaga kerja itu lebih baik, maka dapat terjadi tingkat produksi akan meningkatkan pula (Irawan dan Suparmoko, 2002: 80).

Selama ini kita beranggapan bahwa, tingkat produksi hanya tergantung pada jumlah tenaga kerja berarti kita menganggap bahwa tenaga kerja itu bersifat homogen. Sedangkan kenyataannya tenaga kerja kita sangat heterogen baik dilihat dari segi umur, kemampuan kerja, kesehatan, pendidikan, jenis kelamin, keahlian, dan sebagainya. Jadi agar analisis kata mengenai peranan tenaga kerja bagi pembangunan ekonomi menjadi lebih teliti dan baik, maka kita harus melihat tenaga kerja ini sebagai faktor yang nitrogen oleh karena itu dalam perencanaan pertumbuhan ekonomi. Dalam hubungannya dengan menggunakan tenaga kerja juga diperlakukan adanya perencanaan tenaga kerja (*manpower planning*) yang tetap. Suatu negara harus mampu memperkirakan, misalnya berupa jumlah tenaga ahli teknik, tenaga dokter, tenaga dosen, tenaga guru, tenaga tukang kayu, ahli bangunan, akuntan, sekretaris untuk lima dan sepuluh tahun yang akan datang.

Seperti yang kita ketahui kalau kita bicara tentang kualitas tenaga kerja kita berhubungan dengan apa yang kita sebut sebagai (human capital). Ciri khusus yang dimiliki oleh faktor produksi itu dipakai, dimanfaatkan atau dijual dengan semakin sering faktor produksi itu dipakai bukan kadarnya semakin berkurang, tetapi justru sebaliknya dan bahkan nilainya menjadi semakin tinggi pula.

Sebelum kita melihat bagaimana meningkatkan kualitas, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa yang menjadi tujuan dan faktor produksi tenaga kerja itu. Tujuan utama faktor produksi ini mau dipekerjakan adalah guna mendapatkan balas jasa yang disebabkan upah dan gaji sehingga harga dari tenaga kerja tersebut. Dengan kata lain penawaran tenaga kerja akan tergantung pada tinggi rendahnya tingkat upah. Semakin tinggi tingkat upah dipasar kerja demikian sebaliknya.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan bahwa tingkat upah dengan penawaran tenaga kerja perseorangan berbeda dengan hubungan antara tingkat upah dan penawaran tenaga kerja perseorangan sering ditunjukkan oleh karena penawaran tenaga kerja yang berbelok kebelakang (backward bending supply curve). Ini berarti bahwa setelah tingkat upah tertentu. Dengan naiknya tingkat upah, tidak akan mendorong seseorang bekerja lebih lama atau lebih giat karena pada tingkat pendapatan yang relatif tinggi orang ingin hidup lebih santai.

Tetapi untuk perekonomian sabagai keseluruhan semakin tingginya tingkat upah masih akan mendorong semakin banyak orang untuk masuk ke pasar tenaga kerja. Orang-orang yang tadinya tidak mau ikut mencari pekerjaan pada tingkat upah yang lebih tinggi. Dan dilain pihak dengan perkembangan pendapatan nasional, maka peranan tingkat upah dalam mempengaruhi kemauan orang untuk bekerja masih cukup besar. Terutama dengan adanya efek power maka orang akan tidak merasa bahwa kebutuhannya telah terpenuhi seluruh. Dengan dipenuhi satu kebutuhan, maka kebutuhan baru akan muncul lagi begitu seterusnya, sehingga dapat dikatakan bahwa kebutuhan itu memang tidak terbatas jumlahnya.

2.1.3.6 Perluasan Kesempatan Kerja

Perluasan kesempatan kerja masih merupakan masalah yang luar biasa berat untuk ditanggulangi saat ini. Kesempatan kerja yang tercipta dalam pembangunan selama ini relatif sangat kecil dibandingkan dengan jumlah akumulasi angkatan kerja yang membutuhkan penempatan. Bagaimanapun perluasan kesempatan kerja merupakan kebutuhan yang mendesak karena memberi lebih banyak paling tidak mendapatkan minuman, dan selain untuk tujuan ekonomi juga mengandung pribadi (Umar Juoro, 1985: 32)

Angkatan kerja di Indonesia meliputi bagian penduduk yang berusia 10

tahun ke atas. Penentuan batas umur tersebut adalah berkaitan dengan banyaknya anak putus sekolah sebulan tamat sekolah dasar terpaksa memasuki peranan kerja sebelum waktunya. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja di satu pihak dan laju serta arah investasi dilain pihak mempengaruhi masalah pengangguran dari perluasan kesempatan kerja. Karena itu penempatan seluruh tenaga kerja (full employment) di negara kita tidak dapat dicapai dengan segera.

2.1.3.7 Penempatan Tenaga Kerja

Sasaran penempatan tenaga kerja dalam pembangunan ialah menyediakan kesempatan kerja dalam waktu singkat untuk mereka yang mencari pekerjaan atau pekerjaan yang lebih baik atau akan mencari pekerjaan ialah terbuka kesempatan kerja. Oleh karena itu target penempatan tenaga kerja tidak hanya didasarkan kepada pertumbuhan angkatan kerja saja, tetapi juga perkiraan terhadap jumlah pengangguran termasuk setengah pengangguran dan perkembangan seluruh angkatan kerja dalam waktu yang tidak terlalu lama (Umar Juoro, 1985: 31).

Sektor-sektor modern yang umumnya merupakan proyek PMA dan PMDN mempunyai daya serap terhadap tenaga kerja yang kecil, atau dengan kata lain penciptaan lapangan kerja melalui sektor modern sangat besar biayanya sementara itu sektor non modern yang umumnya lebih bersifat padat karya belum ditangani sentosip sektor modern. Padahal berdasarkan perkiraan sementara sektor non modern mampu menyerap sekitar empat kali jumlah ruang kerja yang terserap ada sektor modern. Tetapi dengan perkembangan sektor modern sebagian besar dari kegiatan usaha sektor non modern (tradisional) justru terdesak dan banyak yang mati. Dengan kemampuan menyerap tenaga kerja yang lebih besar, maka sektor non modern perlu mendapat perhatian dalam program-program investasi dan perlindungan pasaran dari terjamgan sektor modern. Sektor non modern khususnya industri-industri kecil misalnya menerima pekerjaan borongan tertentu dan sebagainya.

Pendidikan tenaga kerja untuk berbagai tingkat tenaga kerja diperlukan banyak modal. Karena itu perlu dibuat perkiraan yang seksama tentang investasi yang diperlukan. Disamping itu juga harus ada pengaturan terhadap konsuasi masyarakat dan menahan permintaan konsumen agar dapat menyisihkan bagian penting produksi yang meningkat untuk investasi, dan agar dapat menyediakan tambahan konsumsi bagi tenaga kerja yang baru ditempatkan tanpa mengurangi investasi. Selain itu, penyebaran industri ke daerah-daerah adalah vital karena daerah-daerah terbelakang pengeluaran dana yang dilakukan akan efektif dan menciptakan kesempatan.

Kebijakan untuk menanggulangi masalah penambahan angkatan kerja dan

pengangguran selain berpokok kepada penciptaan lapangan kerja yang meluas juga harus ditujukan kepada peningkatan produktivitas, sekalipun terbuka kemungkinan konflik antara sasaran perluasan kesempatan kerja dan pertumbuhan ekonomi, komplik tersebut dapat diatasi dengan kebijakan-kebijakan yang tepat. Bagaimanapun harus diusahakan agar kedua sasaran tersebut tidak saling berbenturan, tetapi saling menunjang dan melengkapi.

2.1.3.8 Bukan Angkatan Kerja

Sebagian kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari tiga golongan yaitu:

1. Golongan yang masih bersekolah, yaitu mereka yang kegiatannya hanya atau terutam bersekolah.
2. Golongan yang mengurus rumah tangga, yaitu mereka yang mengurus rumah tangga tanpa memperoleh upah.
3. Golongan lain-lain, yang tergolong dalam lainlain ini ada dua macam yaitu
 - a. Penerimaan pendapatan, yakni mereka yang tidak melakukan kegiatan ekonomi tetapi memperoleh pendapatan seperti pensiunan, bunga atas simpanan atau sewa atas hak milik.
 - b. Mereka yang hidupnya tergantung pada orang lain misalnya karena lanjut usia, cacat, dalam penjara, atau sakit kronis.

Pada dasarnya mereka yang termasuk kelompok bukan angkatan kerja ini (kecuali yang terakhir yang hidupnya tergantung pada orang lain) suatu waktu dapat terjun untuk ikut bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini juga dapat disebut sebagai angkatan kerja potensial (*potential labor force*). Yang termasuk dalam angkatan kerja potensial ini mereka yang menarik diri dari pasar kerja, misalnya setelah cukup lama tidak berhasil pekerjaan yang diharapkan, seseorang mengurungkan niatnya mencari pekerjaan yang dimaksud. Mereka sebenarnya masih ingin bekerja, akan tetapi tidak aktif mencari pekerjaan. Mereka disebut *discoureged works*, yang sementara keluar dari pasar kerja, karena tidak berhasil memperoleh pekerjaan yang dia harapkan.

Bila kondisi pekerjaan cukup menarik atau bila keluarga tidak mampu membiayai sekolah, maka tenaga kerja yang tergolong bersekolah akan meninggalkan sekolahnya untuk sementara dan mencari pekerjaan. Sebaliknya, orang tersebut akan kembali lagi ke bangku sekolah apabila kondisi pekerjaan berubah menjadi kurang menarik atau keluarga sudah mampu membiayainya. Demikian tenaga kerja yang mengurus rumah tangga akan masuk pasar kerja bila tingkat upah tinggi atau bila penghasilan keluarga rendah relatif terhadap kebutuhannya. Mereka akan kembali mengurus rumah tangga apabila keadaan

sebaliknya terjadi. Golongan penduduk yang seperti ini dinamakan juga angkatan kerja sekunder, dibedakan terhadap angkatan kerja primer yaitu mereka yang secara terus menerus dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) (Simanjuntak 1985: 6).

2.1.4 Inflasi

2.1.4.1 Pengertian Inflasi

Pengertian inflasi dapat diungkapkan dalam beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Inflasi adalah suatu keadaan dimana pendapatan nominal meningkat cepat dibandingkan dengan peningkatan arus barang dan jasa yang dibeli (pendapatan nasional riil). (F.W. Paish, Rise and fall of income policy).

Inflasi adalah kecenderungan dari harga untuk menaik secara umum dan terus menerus (Budiono 2001: 161).

Sehingga dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut:

Proses kenaikan hargaharga umum barang-barang secara terus menerus selama suatu periode tertentu. Mungkin dapat terjadi kenaikan tersebut tidaklah bersamaan, yang terpenting terdapat kenaikan harga umum barang terus menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga yang terjadi hanya sekali saja bukan merupakan inflasi.

2.1.4.2 Penyebab Timbulnya Inflasi

Menurut teori kuantitas: Terjadinya inflasi dapat diterangkan dengan rumus Irving Fisher, yaitu:

$$M V = P T$$

Dimana:

M = jumlah uang yang beredar

V = transaksi velocity of money

P = tingkat harga

T = transaksi

Dengan demikian, berarti adanya perubahan jumlah uang yang beredar akan selalu menyebabkan terjadinya perubahan tingkat harga, bahkan secara proporsional (menurut Fisher). Bila pemerintah menambah jumlah uang yang beredar secara terus menerus, maka tingkat harga akan naik yang berarti akan menimbulkan inflasi.

- **Teori Keynes**

Penyebab dari inflasi adalah karena keinginan masyarakat untuk hidup diluar batas kemampuan ekonominya. Interaksi antara agregat demand dan agregat supply menekan harga untuk naik dan ini dikatakan tingkat upah akan

naik sehingga timbul inflasi.

2.1.4.3 Inflasi Menurut Sifatnya

Atas dasar besarnya laju inflasi, dapatlah inflasi dibagi ke dalam tiga kategori (Nopirin, 1996: 27), yakni:

1. Inflasi Merayap (creeping inflation)

Ditandai dengan laju inflasi yang rendah (kurang dari 10% per tahun). Kenaikan harga berjalan lambat, dengan persentase yang kecil serta dalam jangka waktu yang relatif lama.

2. Inflasi Menengah (Galloping Inflation)

Ditandai dengan kenaikan harga yang cukup besar (biasanya double digit atau bahkan triple digit) dan kadang kala berjalan dalam waktu yang relatif pendek serta mempunyai sifat akselerasi. Artinya hargaharga minggu/bulan ini lebih tinggi dari minggu/bulan lalu dan seterusnya. Efeknya terhadap perekonomian lebih berat dari pada inflasi yang merayap (Creeping Inflation).

3. Inflasi Tinggi (Hyper Inflation)

Merupakan inflasi yang paling parah akibatnya. Hargaharga naik sampai lima atau enam kali. Masyarakat tidak lagi berkeinginan untuk menyimpan uang. Nilai uang merosot dengan tajam sehingga ingin ditukarkan dengan barang. Perputaran uang makin cepat, harga naik secara akselerasi. Biasanya keadaan ini timbul apabila pemerintah mengalami defisit anggaran belanja (misalnya ditimbulkan oleh adanya perang) yang dibelanjai atau ditutup dengan mencetak uang.

2.1.4.4 Efek Inflasi

Menurut Nopirin (1996: 32) dalam hal ini dapat dipengaruhi:

1. Efek Terhadap Pendapatan (Equity Effect)

Efek terhadap pendapatan sifatnya tidak merata, ada yang dirugikan tetapi ada pula yang diuntungkan dengan adanya laju inflasi. Seseorang yang memperoleh pendapatan tetap akan dirugikan oleh adanya inflasi. Misalnya seseorang yang memperoleh pendapatan tetap Rp 1.000.000,00 per bulan sedang laju inflasi sebesar 10% akan menderita kerugian penurunan pendapatan riil sebesar laju inflasi tersebut, yakni Rp 100.000,00.

Sebaliknya pihak yang mendapat keuntungan dengan adanya inflasi adalah mereka yang memperoleh kenaikan pendapatan dengan persentase lebih besar dari pada laju inflasi.

Dengan demikian inflasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan dalam pola pembagian pendapatan dan kekayaan masyarakat. Inflasi seolah-olah merupakan pajak bagi seseorang dan merupakan subsidi bagi orang lain.

2. Efek Terhadap Efisiensi (Efficiency Effect)

Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu. Dengan adanya inflasi permintaan akan barang tertentu mengalami kenaikan produksi barang tersebut. Kenaikan produksi barang ini pada gilirannya akan mengubah pola alokasi faktor produksi yang sudah ada. Memang tidak ada jaminan bahwa alokasi faktor produksi itu lebih efisien dalam keadaan tidak ada inflasi. Namun, kebanyakan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi dapat mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien.

3. Efek Terhadap Output

Inflasi mungkin dapat menyebabkan terjadinya kenaikan produksi, alasannya dalam keadaan inflasi biasanya kenaikan harga barang mendahului kenaikan upah sehingga keuntungan pengusaha naik. Kenaikan keuntungan ini akan mendorong kenaikan produksi. Namun, apabila laju inflasi itu cukup tinggi (hyper inflation) dapat mempunyai akibat sebaliknya, yakni penurunan output. Dalam keadaan inflasi yang tinggi, nilai uang riil turun dengan drastis, masyarakat cenderung tidak menyukai uang kas, transaksi mengarah ke barter, yang biasanya diikuti dengan turunnya produksi barang. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan langsung antara inflasi dengan output. Inflasi dapat diikuti dengan kenaikan output, tetapi bisa juga diikuti dengan penurunan output.

• **Jenis Inflasi Dapat Dibedakan Atas Parah Tidaknya Inflasi**

Menurut Khalwaty (2000: 34):

1. Inflasi Ringan

Adalah inflasi dengan laju pertumbuhan yang berlangsung secara perlahan dan berada pada posisi satu digit atau dibawah 10% pertahun.

2. Inflasi Sedang

Adalah inflasi dengan tingkat laju pertumbuhan berada diantar 10-30% pertahun atau melebihi dua digit dan sangat mengancam struktur dan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

3. Inflasi Berat

Merupakan inflasi dengan laju pertumbuhan berada diantara 30-100% pertahun atau melebihi dua digit.

4. Inflasi Sangat Berat

Atau disebut juga hyper inflation adalah inflasi dengan laju pertumbuhan melebihi 100% pertahun.

2.1.4.5 Cara Mencegah Inflasi

Ada empat kebijakan dalam mencegah inflasi (Nopirin, 1996: 34) yaitu:

1. Kebijakan Moneter

Sasaran kebijaksanaan moneter dicapai melalui pengaturan jumlah uang beredar (M). Salah satu komponen jumlah uang adalah uang giral (demand deposit). Uang giral dapat terjadi melalui dua cara, pertama apabila seseorang memasukkan uang kas ke dalam bank, dalam bentuk giro. Kedua, apabila seseorang memperoleh pinjaman dari bank tidak diterima kas tetapi dalam bentuk giro. Untuk menekan laju inflasi cadangan minimum ini dinaikkan sehingga jumlah uang menjadi lebih kecil.

Instrumen lain yang dapat dipakai adalah:

a. Politik pasar terbuka

Politik pasar terbuka yang dipergunakan mengatasi inflasi ini kadang disebut juga sebagai *tight money policy*. Dengan ini dimaksudkan suatu kebijaksanaan dari bank sentral untuk menjual surat-surat berharga seperti obligasi negara kepada masyarakat, sehingga laju inflasi dapat ditekan.

b. Menaikkan tingkat bunga

Keinginan dari seseorang atau badan usaha untuk mengadakan pinjaman kepada badan-badan kredit berhubungan erat dengan keuntungan yang diharapkan dari investasi yang akan dijalankannya dan besarnya bunga yang harus dibayar dari modal yang dipinjam. Bilamana bunga pinjaman semakin besar, maka ada kecenderungan tertahannya aktifitas yang pembiayaannya didasarkan atas peminjaman dari badan kredit.

c. Menaikkan cash ratio

Adalah perbandingan antara uang tunai bankbank ditambah dengan demand deposit pada bank sentral terhadap demand deposit dari masyarakat pada bank yang bersangkutan. Menaikkan cash ratio dari pada bank dagang merupakan suatu tindakan anti inflasi, oleh karena hal ini selain mengurangi reserve yang berlebihan dari bank, dapat juga digunakan untuk mengurangi kemungkinan memenuhi permintaan kredit dari masyarakat.

2. Kebijakan Fiskal

Inflasi dapat dicegah melalui penurunan permintaan total. Kebijakan fiskal yang berupa pengurangan pengeluaran pemerintah serta kenaikan pajak akan dapat mengurangi permintaan total, sehingga inflasi dapat ditekan.

Instrumen kebijakan fiskal:

1. Penurunan pengeluaran pemerintah.

Sektor pemerintah dapat menimbulkan inflasi bila permintaan pemerintah lebih kecil dari pengeluarannya, sehingga untuk membiayai pengeluaran

tersebut terpaksa dikeluarkan uang baru baik dengan jalan mengadakan pinjaman ke bank sentral atau bank dagang maupun dengan cara mengeluarkan uang kertas baru yang akan menyebabkan timbulnya inflasi.

2. Menaikkan pajak.

Dengan menambah pajak atau menambah jenis pajak berarti penghasilan seseorang akan berkurang, karena sebagian dari penghasilannya itu dalam bentuk pajak telah diberikan kepada pemerintah. Apabila penghasilan seseorang berkurang maka tenaga pembelinya juga akan berkurang dan apabila tenaga pembeli berkurang harga barang-barang tidak mungkin naik lagi, melainkan akan turun seimbang dengan jumlah uang yang ada di masyarakat. Dengan demikian inflasi dapat ditekan.

3. Mengadakan pinjaman pemerintah

Suatu cara yang sangat efektif untuk mengatasi inflasi adalah dengan mengadakan pinjaman pemerintah, terlebih lagi berupa pinjaman paksaan. Karena dengan cara demikian akan dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat sehingga akan dapat menurunkan inflasi.

3. Kebijakan yang berkaitan dengan output

Kenaikan output yang memperkecil laju inflasi. Kenaikan jumlah output ini dapat dicapai misalnya dengan kebijakan penurunan bea masuk sehingga impor barang cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah barang di dalam negeri cenderung menurunkan harga.

4. Kebijakan Penentuan Harga dan Indexing

Ini dilakukan dengan penentuan ceiling harga, serta mendasarkan pada indeks tertentu untuk menentukan gaji ataupun upah. Kalau indeks harga naik, maka gaji atau upah juga dinaikkan.

2.1.4.6 Trade-off antara Inflasi dan Pengangguran

Inflasi seperti juga pengangguran merupakan masalah utama makro ekonomi. Akan tetapi, kerugian akibat inflasi jauh lebih ringan dari pada kerugian akibat pengangguran, output potensial menjadi terbuang, dan karenanya penurunan tingkat pengangguran sangat diharapkan. Sedangkan dalam inflasi tidak ada penurunan yang nyata atas output. Sebagaimana telah diketahui sebelumnya, pihak konsumen tidak menyukai terjadinya inflasi karena hal ini sering berkaitan dengan munculnya gangguan, seperti goncangan harga minyak yang mengurangi pendapatan riil, dengan inflasi akan mengganggu efisiensi sistem harga. Apapun alasannya kebijakan menaikkan tingkat pengangguran guna mengurangi laju inflasi yaitu, dengan melakukan trade-off antara pengangguran dengan laju inflasi.

A Teori Phillips

Menurut teori Phillips, semakin dikurangi jumlah pengangguran maka tingkat kenaikan harga dan upah semakin tinggi

$$\text{Laju Inflasi} = \text{Tingkat Kenaikan Upah} - \text{Tingkat kenaikan Produktivitas}$$

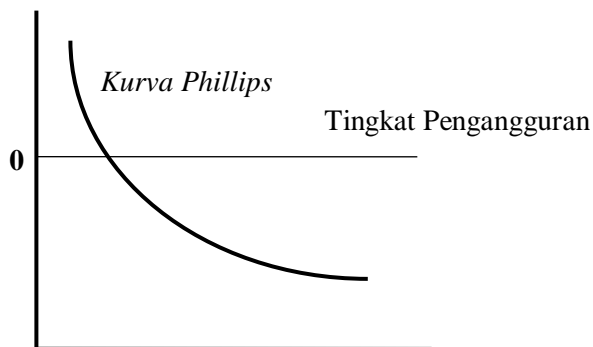
Asumsi yang digunakan disini adalah bahwa antara inflasi dan pengangguran berhubungan secara terbalik. Ini berarti bahwa apabila tingkat inflasi dikurangi maka jumlah pengangguran harus bertambah.

Kurva Phillips menggambarkan keterkaitan antara inflasi dan pengangguran: semakin tinggi tingkat pengangguran akan semakin rendah laju inflasi. Kurva Phillips tersebut merupakan keterkaitan empiris yang menghubungkan perilaku tingkat upah dan inflasi harga dengan tingkat pengangguran.

Kurva Phillips yang memiliki kemiringan menurun, yang menunjukkan bahwa penurunan tingkat pengangguran yang tinggi disertai dengan laju inflasi yang rendah, dan sebaliknya kurva ini menyimpulkan bahwa penurunan tingkat pengangguran akan selalu dapat dipertahankan dengan mendorong kenaikan laju inflasi, dan bahwa laju inflasi akan selalu dapat diturunkan dengan membiarkan terjadinya kenaikan tingkat pengangguran. Dengan ini menyimpulkan adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran.

Gambar 2.1.4.6 Kurva Phillips

Laju Inflasi



Sumber: Dornbusch, R dan Fisher, S, 1992, Makroekonomi
Terjemahan: J. Mulyadi, Erlangga, Jakarta

Kombinasi antara laju inflasi dan tingkat pengangguran yang tinggi pada dekade tahun selanjutnya menimbulkan munculnya keraguan akan kebenaran *Kurva Phillips*, akan tetapi, tetap ada trade-off antara laju inflasi dengan pengangguran. Jangka pendek, misalnya dua tahun, terjadi hubungan antara inflasi dengan pengangguran, namun demikian, kurva phillips belum stabil, kurva tersebut akan bergeser apabila ekspektasi masyarakat atau laju inflasi mengalami perubahan. Dalam jangka panjang ini, tingkat pengangguran pada dasarnya bebas dari inflasi jangka panjang.

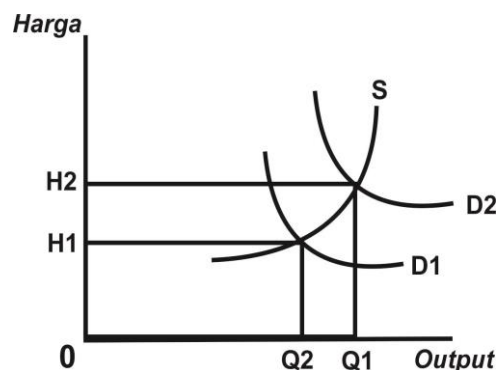
Trade-off jangka pendek dan jangka panjang antara inflasi dan tingkat pengangguran jelas merupakan suatu perhatian yang dipakai dalam mengambil langkah pembuatan kebijakan dan merupakan determinan pokok dari keberhasilan potensial kebijakan stabilisasi.

B Menurut Penyebabnya

1. Inflasi Permintaan (Demand Pull Inflation)

Inflasi yang terjadi karena tarikan permintaan masyarakat yang terus meningkat. Misalnya: banyaknya masyarakat yang meminjam uang pada bank untuk konsumsi maupun untuk modal usaha karena suku bunga pinjaman yang rendah. Oleh sebab itu akan terjadi penarikan permintaan. Secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1.4.6: Inflasi Permintaan (Demand Pull Inflation)



Sumber: Budiono 1985, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No 5
Ekonomi Moneter, Edisi Ketiga, BFFE UGM Yogyakarta, Hal 163

Gambar 2 menggambarkan suatu inflasi permintaan karena permintaan masyarakat akan barang (*Aggregate demand*), bertambah dari Q1 ke Q2. (misalnya karena bertambahnya pengeluaran pemerintah yang disertai dengan pencetakan uang baru atau kenaikan permintaan luar negeri akan

barang ekspor atau bertambahnya pengeluaran investasi swasta karena kredit murah), maka kurva *aggregate demand* bergeser dari D1 ke D2, akibatnya tingkat harga umum naik dari H1 ke H2.

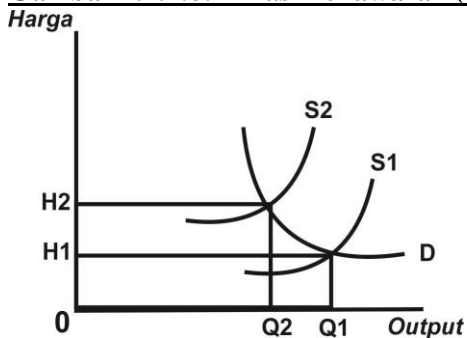
2. Inflasi Penawaran (Cost Push Inflation)

Berbeda dengan inflasi permintaan, inflasi penawaran biasanya dimulai dengan kenaikan harga serta turunnya produksi. Keadaan ini timbul dimulai dengan adanya penurunan dalam penawaran total (*aggregate supply*) sebagai akibat kenaikan dari biaya produksi. (Nopirin, 1996: 30)

Kenaikan biaya produksi ini karena faktor:

- 1) Suatu industri yang bersifat monopolis, misalkan manager perusahaan dapat menggunakan kekuasaannya dalam menaikkan harga (yang lebih tinggi)
- 2) Kenaikan bahan baku
- 3) Perjuangan serikat buruh yang berhasil menuntut kenaikan upah, secara grafik dapat digambarkan sebagai berikut

Gambar 2.1.4.6: Inflasi Penawaran (Cost Push Inflation)



Sumber: Budiono 1985, Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No 5 Ekonomi Moneter, Edisi Ketiga, BFFE UGM Yogyakarta, Hal 163

Pada gambar 3 bila biaya produksi naik (misalnya, karena kenaikan sarana produksi dari luar negeri atau kenaikan bahan bakar minyak) maka kurva penawaran masyarakat (*aggregate supply*) bergeser dari S1 ke S2 serta apabila penawaran masyarakat akan barang berkurang (bergeser dari Q2 ke Q1) disebabkan oleh tingkat harga umum yang cenderung menaik (bergeser dari H1 ke H2).

C Berdasarkan Asal Inflasi

Menurut (Sinungan, 1991: 53) dapat dibedakan atas:

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*Domestic Inflation*)

Inflasi yang berasal dari dalam negeri. Inflasi ini timbul misalnya karena defisit anggaran belanja yang dibiayai dengan pencetakan uang baru, panen yang gagal dan sebagainya. Biasanya inflasi ini dapat berbentuk demand pull inflation, cost push inflation maupun campuran kedua macam inflasi tersebut.

2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*Imported Inflation*)

Inflasi yang timbul karena kenaikan harga-harga diluar negeri. Kenaikan harga barang-barang yang di impor mengakibatkan:

- a. Secara langsung menaikkan indeks biaya hidup karena sebagian yang tercakup di dalamnya berasal dari impor.
- b. Secara tidak langsung menaikkan indeks harga melalui kenaikan ongkos produksi dan harga jual dari berbagai barang yang menggunakan bahan mentah atau mesin-mesin yang harus diimpor tersebut (*Cost Push Inflation*).

Secara tidak langsung menimbulkan kenaikan harga di dalam negeri karena ada kemungkinan (tetapi ini tidak harus demikian) kenaikan harga barang-barang impor mengakibatkan kenaikan pengeluaran pemerintah atau swasta yang berusaha mengimbangi kenaikan harga impor tersebut (*Demand Pull Inflation*).

2.2 Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai tingkat pengangguran telah banyak dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya, akan tetapi dibuat dengan peninjauan dari berbagai sudut, ruang lingkup dan berbagai metode analisis antara lain:

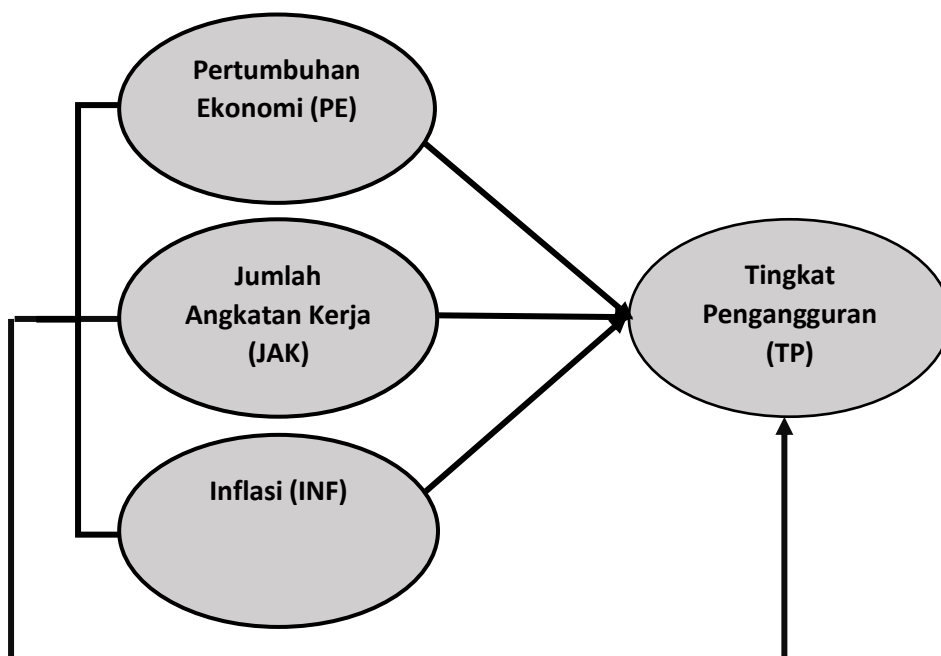
No	Peneliti dan Judul	Variabel	Alat Uji	Hasil
1	Arfan Poyoh (UNSRAT: 2017) Judul: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Sulawesi Utara (2006-2015).	Independent Variabel: Tingkat Upah (X1), Inflasi (X2), dan Pertumbuhan PDRB (X3). Dependent Variabel: Tingkat Pengangguran (Y)	Uji (t) Parsial dan Uji F Simultan	Uji (t): (X1) berpengaruh terhadap (Y), (X2) tidak berpengaruh terhadap (Y), dan (X3) tidak berpengaruh terhadap (Y) Uji F: X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh terhadap (Y)

2	Mochammad Heru Anggoro (UNESA: 2015) Judul: Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Angkatan Kerja terhadap Tingkat Pengangguran di Kota Surabaya (2003-2015)	Independent Variabel: Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Pertumbuhan Angkatan Kerja (X2). Dependent Variabel: Tingkat Pengangguran (Y)	Uji (t) Parsial dan Uji F Simultan	Uji (t): (X1) berpengaruh terhadap (Y), (X2) tidak berpengaruh terhadap (Y) Uji F: X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap (Y)
3	Isti Qomariyah (UNESA: 2017) Judul: Pengaruh Inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa Timur (2001-2011)	Independent Variabel: Inflasi (X1) dan Pertumbuhan Ekonomi (X2) Dependent Variabel: Tingkat Pengangguran (Y)	Uji (t) Parsial dan Uji F Simultan	Uji (t): (X1) tidak berpengaruh terhadap (Y) dan (X2) berpengaruh terhadap (Y) Uji F: X1 dan X2 secara simultan berpengaruh terhadap (Y)
4	Dwi Aprilia Putri (UNESA: 2014) Judul: Analisis Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Jawa Timur (2003-2014)	Independent Variabel: Inflasi (X1), Upah Minimum (X2), dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) Dependent Variabel: Tingkat Pengangguran (Y)	Uji (t) Parsial dan Uji F Simultan	Uji (t): (X1) berpengaruh terhadap (Y), (X2) berpengaruh terhadap (Y), dan (X3) tidak berpengaruh terhadap (Y) Uji F: X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh terhadap (Y)
5	Fatmi Ratna	Independent	Uji (t)	Uji (t): (X1) tidak

	Ningsih (UIN Jakarta: 2010) Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia (1988 - 2008)	Variabel: Inflasi (X1), Pertumbuhan Ekonomi (X2), dan Pertumbuhan Ekonomi (X3) Dependent Variabel: Tingkat Pengangguran (Y)	Parsial dan Uji F Simultan	berpengaruh terhadap (Y) dan (X2) berpengaruh terhadap (Y) Uji F: X1, X2, X3 secara simultan berpengaruh terhadap (Y)
--	---	--	----------------------------	---

2.3 Kerangka Konseptual

Desain dari penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif maka digambarkan secara skematis hubungan antar Variabel penelitian dan diungkapkan hubungannya yang di dasarkan oleh teori dan penelitian terdahulu. Berikut adalah gambar skematis dari penelitian ini:



Dimana PE adalah pertumbuhan ekonomi, JAK adalah jumlah angkatan kerja, dan dan INF adalah inflasi. Dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena untuk mengetahui berapa besar pengaruh PE, JAK, dan INF

terhadap TP. Uji data dan uji hipotesis menggunakan alat SPSS 21 yang menghasilkan pengaruh parsial dan pengaruh simultan variabel bebas terhadap variabel terikat, karena variabel sudah jelas maka penyebutan tidak lagi menggunakan X dan Y tapi menggunakan inisial dari kepanjangan nama variabel. pertumbuhan ekonomi bisa disingkat PE, jumlah angkatan kerja bisa disingkat (JAK), inflasi bisa disingkat (INF), dan tingkat pengangguran bisa disingkat (TP).

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya masih harus diuji secara empiris. Hipotesis dari penelitian ini adalah

1. Diduga pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur
2. Diduga jumlah angkatan kerja berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur
3. Diduga inflasi berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur
4. Diduga pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja, dan inflasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Jawa Timur